

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Badrudin, 2012). Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Desentralisasi terdiri atas tiga konsep yaitu desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) (dalam Sidik et al, 2002).

Dalam berbagai penelitian, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio pada komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada APBD (Sasana, 2009 dalam Badrudin, 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah. Belanja daerah sendiri terdiri atas kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, tak terduga dan kelompok belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal/belanja

modal yang merupakan pengeluaran dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1985).

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyimpulkan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Semetara itu Dodik Siswantoro dan Kusnandar menyebutkan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan PAD berpengaruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji masalah penelitian

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

(Survey pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.

2. Bagi peneliti

Diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, serta menjadi syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam mengembangkan PAD sehingga menjadi daerah otonom yang mampu mengembangkan daerahnya, serta konsep desentralisasi dapat terwujud dengan baik dan Pemerintah Daerah tidak terus bergantung pada Pemerintah Pusat.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas skripsi ini perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis data yang diuraikan dalam deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, keterbatasan, serta saran-saran yang diberikan.